PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2025



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 03

NGANJUK

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/350/K/411.013/2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dan berdasarkan hasil evaluasi dalam pelaksanaannya, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN
   Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah;
b. BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
   Memuat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diampu oleh masing-masing Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I pelaksanaan APBD;
c. BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
   Memuat kebijakan umum rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah serta faktor-faktor yang melatarbelakangi perlunya Perubahan Renja Perangkat Daerah;
d. BAB IV : PENUTUP

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perubahan rencana kerja dari:

a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i. Dinas Tenaga Kerja;
j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
k. Dinas Lingkungan Hidup;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

s. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
u. Dinas Pertanian;
v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
w. Sekretariat Daerah;
x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
z. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
aa. Badan Pendapatan Daerah;
bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
cc. Inspektorat Daerah;
dd. Kecamatan Bagor;
ee. Kecamatan Baron;
ff. Kecamatan Berbek;
gg. Kecamatan Gondang;
hh. Kecamatan Jatikalen;
ii. Kecamatan Kertosono;
jj. Kecamatan Lengkong;
kk. Kecamatan Loceret;
ll. Kecamatan Nganjuk;
mm. Kecamatan Ngetos;
nn. Kecamatan Ngluyu;
oo. Kecamatan Ngronggot;
pp. Kecamatan Pace;
qq. Kecamatan Patianrowo;
rr. Kecamatan Prambon;
ss. Kecamatan Rejoso;
tt. Kecamatan Sawahan;
uu. Kecamatan Sukomoro;
vv. Kecamatan Tanjunganom;
ww. Kecamatan Wilangan; dan
xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN XV
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/ 350 /K/411.013/2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah menerjemahkan secara operasional perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja Perangkat Daerah menjembati rencana strategis ke rencana operasional ke dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja rencana strategis jangka menengah.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

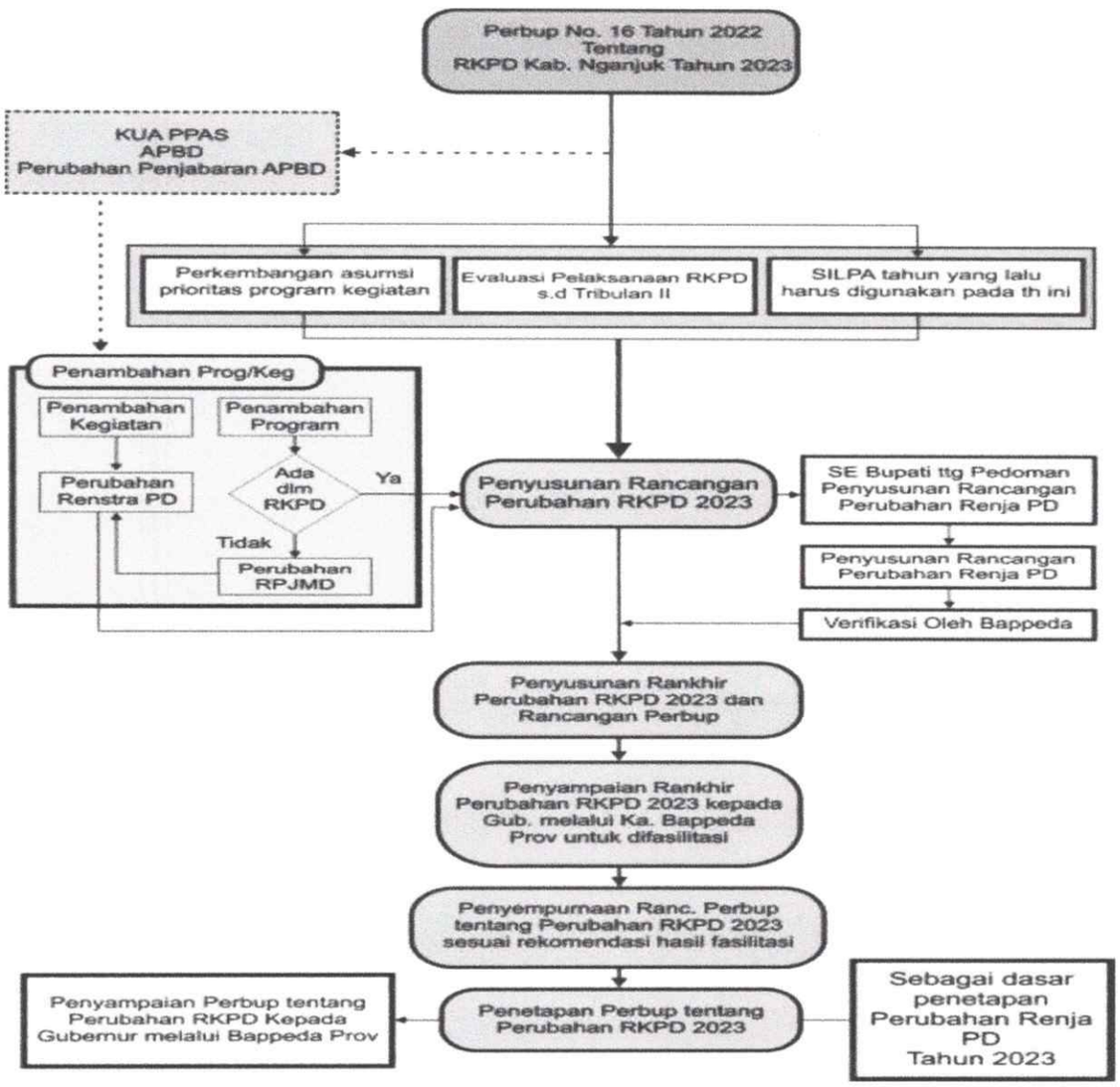
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau
c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mempedomai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan meliputi: (1) evaluasi hasil Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I; (2) penyusunan rancangan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024; (3) penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025; dan (4) penetapan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025, secara diagramatik diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 1.1

Diagram Alir Perubahan Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD serta didasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan I tahun berkenaan, pada akhirnya Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Perhubungan (RKA-SKPD) untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Perhubungan adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

23. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
31. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek;
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
33. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan
34. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan;
35. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

36. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan
37. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
38. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
39. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
40. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaanya Tahun Anggaran 2023;
46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*;
47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
51. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026
52. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
53. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026
54. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
55. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
56. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
57. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyesuaian rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terhadap perkembangan keadaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a. Menetapkan perubahan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I Tahun 2025;
b. Mengakomodir Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk pergeseran APBD yang ditetapkan dalam Perubahan Penjabaran APBD;
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan; dan
1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II Evaluasi Renja Dinas Perhubungan sampai dengan triwulan I tahun 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Berkenaan dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk;
2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk; dan
3.2. Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Pelaksanaan evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk melalui capaian kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, dan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Perhubungan telah melaksanakan program kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsinya terkait indikator tersebut, diantaranya adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Triwulan I Tahun 2025 mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tribulan I Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) Tribulan I	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	15				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**									
2	15				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									25%
						Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	**92 Nilai**	**81,2**	**91**			**91,5 Nilai**		
2	**15**	**01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**8 dokumen**	**13 Laporan**	**8 Dokumen**	**8 Dokumen**	**100%**	**8 Dokumen**	**2 Dokumen**	**25.00%**
2	15	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	-	0,00%
2	15	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	1 Laporan	25,00%
2	15	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	1 Laporan	50,00%
2	**15**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**100%**	**2 Laporan**	**1 laporan**	**50,00%**
2	15	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang /Bulan	66 Orang /Bulan	66 Orang /Bulan	66 Orang /Bulan	100%	58 orang/bulan	58 orang/bulan	58 orang/bulan

2	15	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	-	-	0.00%
2	15	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	1 laporan	1 Laporan	100,00%
2	**15**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2 dokumen**	**1 dokumen**	**2 dokumen**	**2 dokumen**	100%	**2 dokumen**	-	**0,00%**
2	15	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 dokumen	66 paket	66 paket	100%	1 paket	-	0.00%
2	15	01	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	61 orang	-	3 orang	3 orang	-	64 orang	64 orang	100.00%
2	**15**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dipenuhi**	**4 dokumen**	**9 Paket**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**100%**	**4 dokumen**	**1 dokumen**	**25.00%**
2	15	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 Paket	100,00%
2	15	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	1 Paket	25,00%
2	15	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	3 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	1 Paket	25.00%
2	15	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
2	15	01	2,06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	2 paket	1 Paket	50.00%
2	15	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	10 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	1 Laporan	25,00%
2	15	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	60 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	1 Laporan	25,00%
2	15	01	2,06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamispada SKPD	100 dokumen		-	--	-			
2	**15**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**	**20 unit**	**17 unit**	**20 unit**	**107 unit**	535%	**123 unit**	-	**0.00%**

2	15	01	2,07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit		-	-	-			
2	15	01	2,07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit		-	-	-			
2	15	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	2 unit	3 unit	97 unit	**100%**	89 unit	-	0.00%
2	15	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	15 unit	10 unit	10 unit	100%	34 unit	-	0.00%
2	**15**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaporkan**	**4 Laporan**	**20 Laporan**	**28 Laporan**	**28 Laporan**	**100%**	**4 Laporan**	**1 laporan**	25.00%
2	15	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	2 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	1 laporan	25.00%
2	15	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	4 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	3 Laporan	25,00%
2	15	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	3 Laporan	25,00%
2	**15**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barnag Milik Daerah Pada Perangkat Dearah Yang Terpelihara**	**258 Unit**	**132 Unit**	**117 Unit**	**117 Unit**	**100%**	**279 Unit**	**47 unit**	**16.85%**
2	15	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit						-
2	15	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya	36 unit	40 unit	117 unit	117 unit	100%	47 unit	47 unit	**16.85%**
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	100 unit	-				70 unit	-	
2	15	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	121 Unit	90 unit	90 unit	90 unit	100%	160 unit	-	**0,00%**
2	15	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	-	0.00%
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**									**20%**

						V/C Rasio jalan perkotaan	**0.3**					**0.3**	**0,22**	**136%**
						Persentase Jumlah Kendaraan Angkutan Yang Lulus Uji Kir	**99.00%**					**99.00%**	**98,18%**	**99,17%**
						Load Faktor Angkutan Sekolah Gratis	**100%**					**100%**	**80,31%**	**80,31%**
						Persentase pemasangan perlengkapan jalan	**91,8**					**89,10**	**0**	**0%**
2	**15**	**02**	**2,01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang Dibuat**	**1 dokumen**		-	-	-			
2	15	02	2,01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen		-	-	-			
2	**15**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah prasarana jalan dan perlengkapan jalan yang dibangun dan dipelihara**	**11779 unit**	**1875 unit**	**11.487 unit**	**11.487 unit**	**100%**	**11.744 unit**	**2.952unit**	**25.14%**
2	15	02	2,02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terbangun	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100.00%
2	15	02	2,02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	50 Unit	51 unit	248 unit	248 unit	100%	15 unit	15 unit	**100.00%**
2	15	02	2,02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4 unit	2 unit	5 unit	5 unit	100%	4 unit	4 unit	10.00%
2	15	02	2,02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	11723 unit	1820 unit	11.232 unit	11.232 unit	100%	11.723 unit	2.931 unit	**25,00%**
2	**15**	**02**	**2,03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Jumlah terminal tipe c yang dikelola**	**5 unit**	**5 unit**	**5 unit**	**5 unit**	**100%**	**1 unit**	-	**0.00%%**
2	15	02	2,03	0003	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1 unit							
2	15	02	2,03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	1 unit	-	0.00%%
2	**15**	**02**	**2,04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan**	**4 Laporan**	**1 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**100%**	**4 laporan**	**1 laporan**	**25.00%**

2	15	02	2,04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	4 laporan	1 laporan	25.00%
2	**15**	**02**	**2,05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Wajib Uji Secara Berkala**	**2500 unit**	**12 Laporan**	**5000 unit**	**5000 unit**	**100%**	**5013 unit**	**1250 unit**	**24.94%**
2	15	02	2,05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3 unit	5 unit	5 unit	5 unit		-	-	-
2	15	02	2,05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2500 Dokumen	5000 unit	5000 Dokumen	5000 Dokumen	100%	5000 dokumen	1250	**25,00%**
2	15	02	2,05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	13 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	13 unit	-	0.00%
2	15	02	2,05	0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Restribusi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	-							
2	**15**	**02**	**2,06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan**	**4 Laporan**	**19 Laporan**	**18 Laporan**	**18 Laporan**	**100%**	**15 Laporan**	**4 laporan**	**26.67%**
2	15	02	2,06	0001	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk JalanKabupaten/Kota	4 Laporan	6 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	1 laporan	25,00%
2	15	02	2,06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 dokumen	-	4 laporan	4 laporan		4 laporan	1 laporan	25.00%
2	15	02	2,06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 laporan	12 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	1 laporan	25,00%
2	15	02	2,06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Laporan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	4 dokumen	-	4 laporan	4 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100,00%
2	15	02	2,06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	1 laporan	-	**0,00%**
2	**15**	**02**	**2,07**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Permohonan Adalalin Yang Ditindaklanjuti**	**4 laporan**	**6 laporan**	**8 laporan**	**8 laporan**	**100%**	4 laporan	1 laporan	25,00%

2	15	02	2,07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4 laporan	-	4 laporan	4 laporan	100%	-	-	-
2	15	02	2,07	0006	Pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	4 laporan	6 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	1 laporan	25,00%
2	**15**	**02**	**2,08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Yang Dilaksanakan**	**4 Laporan**	**12 Laporan**	**6 Laporan**	**6 Laporan**	**100%**	4 laporan	**1 laporan**	25,00%
2	15	02	2,08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	4laporan	1 laporan	**25,00%**
2	**15**	**02**	**2,09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia**	**24 unit**	**3 Unit**	**21 Unit**	**21 Unit**	**100%**	24 unit	**24 unit**	**100.00%**
2	15	02	2,09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aramada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	24 Unit	3 Unit	21 Unit	21 Unit	100%	24 unit	24 unit	**100.00%**
2	15	02	2,09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan							
2	**15**	**02**	**2.11**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersusun**	-	**1 dokumen**				-		
2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kebijakan pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	**1 dokumen**				-	-	

Evaluasi renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik, dimana persentase capaian kinerja adalah sebesar 20%. Capaian kinerja tersebut dilaporkan secara akuntabel pada Laporan Triwulan I Dinas Perhubungan.

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025 Dinas Perhubungan dan pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s/d Tahun 2025 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perhubungan, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Untuk kegiatan rutin seperti gaji pemeliharaan dan lainnya berjalan sesuai dengan aliran kas , namun beberapa Pengerjaan seperti Pemeliharaan Gedung Kantor belum bisa terlaksana dikarena menunggu adanya refocusing anggaran di tahun 2025	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Mempercepat pelaksanaan perencanaan kegiatan sambil menunggu selesai refocusing anggaran
Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	20%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Masih menunggu adanya refocusing anggaran di tahun 2025 seperti Pemasangan LPJU Tersebar se Kab Nganjuk , Pembangunan Halte, Pembangunan Flashlight, Cermin Tikungan Jalan, Rambu Lalu Lintas, Guradrail	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Mempercepat pelaksanaan perencanaan kegiatan sambil menunggu selesai refocusing anggaran

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama (core bussiness) dan indikator kinerja

pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Evaluasi indikator urusan perhubungan sampai dengan Tribulan I Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan

Pelaksanaan urusan Perhubungan sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan, pelayanan tersebut berupa pemenuhan prasarana keselamatan transportasi. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dikaitkan dengan kedua komponen pelayanan tersebut. Adapun evaluasi indikator urusan perhubungan sampai dengan Tribulan I dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan

Data jumlah kecelakaan yang terjadi diKabupaten Nganjuk Tribulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	KORBAN KECELAKAAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	JUMLAH
1	Jumlah Kecelakaan	69	51	58	178
2	Meninggal dunia	12	2	6	20
3	Luka berat	0	8	1	9
4	Luka ringan	136	86	79	301
5	Kerugian Materi (Rp)	72.900.000	76.900.000	55.750.000	205.550.000

Sumber : Kepolisian Resort Nganjuk

Data Kendaraan Sampai Tribulan I Tahun 2025

No	Data Kendaraan	Tahun 2024	Tribulan I Tahun 2025		
			Kendaraan Baru Sampai Maret 2025	Mutasi Keluar Sampai Maret 2025	Tahun 2025
1	Roda 4	61.588	815	211	62.192
2	Roda 2	378.429	3.367	198	381.598
Jumlah Kendaraan		440.017	4.102	409	443.790

Sumber : Bapenda Provinsi Jatim UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Nganjuk (Samsat)

Berdasarkan data diatas, perhitungan Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan adalah sebagai berikut :

$$\frac{Jumlah\ \ kecelakaan\ Lalu\ Lintas}{Jumlah\ kendaraan} \times 10.000$$

$$= \frac{178}{443.790} x10.000 = 4{,}01$$

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan pada tribulan I Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tribulan I		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya keselamatan transportasi melalui penyelenggaraan transportasi daerah yang tertib,lancar,selamat,aman dan berkelanjutan	Rasio kecelakaan per 10.000 kendaraan	22	4,01	548,63%
2	Meningkatkan keselamatan transportasi	Rasio kecelakaan per 10.000 kendaraan	22	4,01	548,63%

Hasil perhitungan menunjukkan progres kinerja indicator Rasio Kecelakaan tahun 2025 pada tribulan I sebesar 548,63 % dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa progress kinerja indikator Rasio Kecelakaan pada tribulan I masih tercapai. Diharapkan pada tribulan berikutnya angka kecelakaan bisa ditekan.

Untuk menekan angka kecelakaan Permasalahan-permasalahan yang ditindak lanjuti Dinas Perhubungan dipetakan sebagaimana berikut:

a. Masih rendahnya kesadaran pengguna jalan terhadap keselamatan lalu lintas
b. Masih terdapat Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan
c. Kurangnya jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang memenuhi standar
d. Masih terdapatnya perlintasan sebidang yang tidak berpalang pintu
e. Masih tingginya hambatan samping yang mengurangi V/C rasio jalan
f. Tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pelajar

Dengan dipetakan permasalahan yang ada maka fokus dan arah kebijakan pelayanan Dinas Perhubungan meliputi :

a. Sosialiasi/penyuluhan keselamatan lalu lintas
b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan transportasi
c. Meningkatkan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor
d. Meningkatkan fasilitas perlengkapan jalan
e. Meningkatkan sarana dan prasarana angkutan umum
f. Pembangunan palang pintu perlintasan sebidang kereta api
g. Melaksanakan pengaturan, pengamanan dan penertiban lalu lintas angkutan jalan
h. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas
i. Meningkatkan pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
j. Melaksanakan kajian pengembangan angkutan umum
k. Mengintegrasikan sistem angkutan umum
l. Menyediakan pelayanan angkutan sekolah gratis yang menjangkau semua wilayah kabupaten Nganjuk.
m. Mewujudkan pelaksanaan angkutan perintis dan angkutan karyawan
n. Dengan Arah kebijakan pelayanan yang dilakukan Dinas Perhubungan Diharapkan sampai akhir tahun dapat menekan angka kecelakaanangkutan karyawan

Dengan Arah kebijakan pelayanan yang dilakukan Dinas Perhubungan Diharapkan sampai akhir tahun dapat menekan angka kecelakaan.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Kinerja Tribulan I Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	V/C Rasio Jalan Perkotaan	0,3	0,3	100%
2.	Persentase uji kir kendaraan	99%	98,18%	99,17%
3.	Jumlah terminal tipe C	5 unit	5 unit	100%
4.	Persentase pemasangan perlengkapan jalan	89,1 %	0 %	0 %

Dari Hasil perhitungan Indikator Kinerja Kunci (IKK) menunjukkan progres kinerja yang cukup baik namun terdapat indikator yang memiliki capaian 0% yaitu Persentase pemasangan perlengkapan jalan dikarenakan proggres pemasangannya di tribulan II, Diharapkan pada tribulan II dapat mencapai progres yang lebih baik.

2.2.2 Permasalahan dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Secara umum permasalahan dan Isu-isu penting yang dihadapi dalam penyelenggaraan transportasi saat ini dapat disampaikan, antara lain:

No	Permasalahan	Isu Strategis	Intervensi kegiatan tahun 2025
1	Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran pengguna jalan terhadap keselamatan lalu lintas	Peningkatan kedisiplinan berlalulintas	Sosialisasi keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan
2	Masih terdapat Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan	Peningkatan layanan pengujian serta inspeksi kendaraan bermotor	Peningkatan layanan uji KIR
			Peningkatan Penegakan hukum keselamatan dan ketertiban lalu lintas
3	Fasilitas perlengkapan jalan belum terpenuhi secara kuantitas dan standar teknis	Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan yang memenuhi standar teknis	Penyediaan perlengkapan jalan sesuai kebutuhan dan standar teknis
4	Belum optimalnya layanan prasarana transportasi	Peningkatan layanan prasarana transportasi	Peningkatan layanan Terminal dan halte
5	Belum optimalnya pengelolaan parkir	Percepatan penyusunan regulasi pengelolaan parkir	Percepatan penyusunan Perda Parkir dan Perbup penindakan atas pelanggaran parkir
6	Masih tingginya volume kendaraan pada jam sibuk	Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas dan layanan transportasi umum	Penerapan dan pengawasan rekayasa lalu lintas
			Pengamanan dan pengaturan di Diperlintasan Kereta Api
			Pengoperasian angkutan sekolah gratis

Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk maupun isu-isu penting dinas perhubungan melalui serangkaian program dan kegiatan,

baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi. Potensi dan kondisi sektor Perhubungan Kabupaten Nganjuk beserta sarana pendukungnya yang terdiri dari :

1. Sosialisasi keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan bentuk layanan berupa :
   a. Sosialisasi keselamatan lalu lintas anak usia dini Dalam rangka memberikan wawasan tentang keselamatan berlalu lintas dan memperkenalkan rambu-rambu lalu lintas pada anak, Dinas Perhubungan Kab Nganjuk bersinergi dengan Polres Nganjuk melaksanakan Sosialisasi ini untuk menanamkan pengetahuan dan menumbuhkan perilaku tertib ber lalu lintas sejak dini. Dengan harapan anak-anak memahami tata cara berlalu lintas lintas dengan baik, mengenal rambu-rambu lalu lintas dengan baik dan benar sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan di masa datang. Pada gilirannya nanti, saat mereka dewasa mereka mampu mengendarai motor/mobil dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah diketahui/dipahami serta berlalu lintas dengan tertib sesuai aturan yang berlaku.
   b. Pembinaan dan Bimbingan Teknis baik untuk pengusaha angkutan maupun pengemudi angkutan untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan dan ketaatan dalam mematuhi peraturan lalu lintas maka perlu adanya sosialisasi Pentingnya Etika Berlalu Lintas di Jalan. Pengertian sederhana Etika berlalu lintas adalah tata krama kesopanan yang perlu diajarkan kepada masyarakat pengguana jalan khususnya dalam berlalu lintas di jalan. Tata cara berlalu lintas adalah bagaimana perilaku masyarakat pengguan jalan dalam berlalu lintas selalu menaati peraturan lalu lintas sebagai petunjuk atau pedoman, sehingga masyarakat selama berlalu lintas dijalan dapat menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dalam berlalu lintas serta terhindar dari bentuk pelanggaran dan kecelakaan
   c. Pelaksanaan Abdi Yasa Teladan untuk memdudukkan insan

pengemudi angkutan umum sejajar dengan insan pembangunan lainnya dengan cara meningkatkan motivasi melalui pemberian penghargaan terhadap profesinya.

2. Peningkatan layanan uji KIR dan Penegakan hukum keselamatan dan ketertiban lalu lintas berupa :
    a. Balai Pengujian kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu UPT dari Dinas Perhubungan yang berfungsi untuk memberikan pelayanan berupa pengujian kelaikan kendaraan bermotor. Uji laik jalan diberlakukan untuk angkutan barang maupun angkutan orang. Rata-rata kendaraan dilayani sebanyak 40 unit perhari. Waktu pelayanan 30 menit terdiri dari 20 menit pelayanan uji dan 10 menit untuk keperluan dokumen. Jumlah penguji 8 orang , diharapkan dengan adanya pengujian yang optimal kendaraan bermotor bisa memenuhi persyaratan laik jalan
    b. Penegakan hukum keselamatan dan ketertiban lalu lintas Dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas yang masih menjadi momok di jalan raya, Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, bersama Dinas Perhubungan Provinsi dan Satlantas Polres Nganjuk, menggelar Operasi Gabungan Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Operasi ini menyasar berbagai aspek seperti kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL), kelayakan jalan kendaraan, uji KIR, hingga pelanggaran rambu-rambu lalu lintas
3. Penyediaan perlengkapan jalan sesuai kebutuhan dan standar teknis merupakan Fasilitas perlengkapan jalan yang berfungsi untuk menciptakan lalu lintas yang lancar dan mencegah terjadinya kecelakaan. Perlengkapan jalan akan mengarahkan dan menuntun pengguna jalan sehingga ketertiban lalu lintas akan terjaga
4. Terminal dan Halte merupakan prasarana penting dalam sebuah sistem transportasi. Terminal merupakan simpul dari jaringan trayek angkutan umum. Keberadaan terminal sangat penting dalam melayani masyarakat dalam melakukan perjalanan dengan angkutan umum. Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk dalam hal

pengelolaan terminal adalah mengelola Terminal Tipe C. Terdapat 5 unit Terminal Tipe C di Kabupaten Nganjuk diantaranya sebagai berikut :

a. Terminal Tipe C Nganjuk
b. Terminal Tipe C Sawahan
c. Terminal Tipe C Berbek
d. Terminal Tipe C Gondang
e. Terminal Tipe C Warujayeng

Selain sebagai simpul jaringan trayek dalam memberikan pelayanan masyarakat dalam melakukan perjalanan dengan angkutan umum, Terminal Tipe C juga merupakan unit penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retibusi Terminal. Retribusi dikenakan kepada Angkutan Umum yang masuk dan menggunakan fasilitas di dalam terminal.

Halte berfungsi sebagai lokasi naik dan turun penumpang angkutan umum pada lokasi telah ditentukan. Halte sangat bermanfaat bagi calon penumpang karena memberikan kenyamanan saat menunggu kedatangan angkutan umum. Halte di Kabupaten Nganjuk sejumlah 35 unit tersebar di beberapa kecamatan.

5. Volume kendaraan yang melebihi kapasitas lahan parkir yang tersedia dapat menyebabkan kemacetan dan antrian panjang, serta terganggunya aktivitas lalu lintas beberapa ruas jalan atau tepi jalan umum terdapat Parkir liar yang dapat menyebabkan kemacetan, membahayakan pengguna jalan, dan merugikan pendapatan dari retribusi parkir yang sah Dalam Melaksanakan peraturan bupati nganjuk tentang Restribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan mengadakan perjanjian kerjasama tentang fasilitas pelaksanaan pemungutan restribusi parkir secara berlangganan pada kantor bersama samsat kabupaten nganjuk dengan kerjasama tersebut diharapkan dapat Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan fasilitas pemungutan Restribusi Parkir secara berlangganan dengan memanfaatkan basis data (DataBase) yang ada pada kantor bersama SAMSAT, mengoptimalkan pendapatan daerah dari restribusi pelayanan parker di tepi jalan umum bagi pemerintah kabupaten dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan penyediaan fasilitas parker di tepi jalan umum, dan dengan Perda parkir dan Perbup yang disusun diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
6. Dengan Penerapan dan pengawasan rekayasa lalulintas diharapkan dapat menurunkan volume kendaraan, beberapa kegiatan rekayasa lalulintas antara lain :

a. Pengamanan lalu lintas dalam rangka hari besar keagamaan, hari besar nasional dan hari jadi kabupaten nganjuk. Dalam rangka menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas selama hari besar keagamaan, hari besar nasional dan hari jadi kabupaten nganjuk Dinas Perhubungan menerjunkan personil atau petugas untuk berjaga di Ruas-ruas jalan untuk tetap menjaga Ketertiban, Keamanan dan mengatur Kelancaran Berlalulintas.
b. Peningkatan keselamatan pos jaga dan palang pintu perlintasan kereta api merupakan prioritas utama di Kabupaten Nganjuk. Pemerintah daerah telah meresmikan beberapa pos jaga dan palang pintu jalur perlintasan langsung (JPL) kereta api untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko kecelakaan. Adanya pos jaga dan palang pintu JPL diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melintasi jalur kereta api.
c. Angkutan Sekolah Gratis merupakan sebuah inovasi baru dari Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk dalam memberikan layanan transportasi sekolah gratis bagi pelajar. Guna Mengurangi kemacetan pada kawasan pendidikan di jam-jam sibuk dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas khususnya banyak terjadi pada pelajar yang belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang mengendarai kendaraan pribadi ke sekolah.

2.2.3 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapai Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan transportasi saat ini dapat disampaikan, antara lain:

a. Terbatasnya prasarana jalan yang dapat disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk sehingga banyak fungsi jalan yang tumpang tindih baik antara jalan arteri dengan kolektor maupun dengan jalan lokal, sebagai akibat dari bercampurnya lalu lintas dan lalu lintas lokal;
b. Menurunnya kualitas pelayanan prasarana jalan yang ada di jalur-jalur utama, terutama akibat angkutan dengan muatan dan dimensi berlebih (overload dan oversize) dan rendahnya alokasi dana pemeliharaan;

c. Belum optimalnya penyediaan terminal tipe C yang memadai di jaringan pelayanan angkutan umum sebagai pangkalan angkutan umum, tempat naik turun penumpang, dan perpindahan moda
d. Masih tingginya tingkat pencurian dan pengrusakan terhadap fasilitas lalu lintas;
e. Masih terpusatnya kegiatan perdagangan, perkantoran dan jasa di kawasan dalam kota dan terbatasnya kemampuan pemerintah maupun pihak swasta dalam menyediakan lahan parkir sehingga masih banyak penggunaan parkir di badan jalan yang menyebabkan berkurangnya kapasitas ruas jalan;
f. Belum optimalnya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Nganjuk
g. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga mengurangi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk dalam penataan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan;
h. Belum adanya Undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi yang mengatur mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas, sehingga terjadi perbedaan penerapan Andalalin di masing-masing daerah

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, selaku pemangku kepentingan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja Dinas Perhubungan dalam upaya mendukung upaya Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	REKOMENDASI SKPD	VOLUME	SATUAN
	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)					
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		**Jumlah Prasarana Jalan dan Perlengkapan Jalan Yang Tersedia dan Dipelihara**			
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		**Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia**			
1		Desa Bukur Kecamatan Patianrowo, Kab. Nganjuk		LPJU	3	Unit
2		Desa Katerban kecamatan Baron, Kab. Nganjuk		LPJU	2	Unit
3		Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo, Kab. Nganjuk		LPJU	3	Unit
4		Desa Lestari Kecamatan Patianrowo, Kab. Nganjuk		LPJU	1	Unit
5		Desa Balongrejo Kec. Berbek ke Desa Jatirejo Kec. Nganjuk , Kab. Nganjuk		LPJU	20	Unit
6		Desa Blongko ke Desa Klodan Kec. Ngetos , Kab. Nganjuk		LPJU	20	Unit
7		Desa Sonoageng Kecamatan Prambon, Kab. Nganjuk		Trafic Light	1	Unit
8		Desa Trayang menuju Desa Kalianyar Kec. Ngronggot , Kab. Nganjuk		LPJU	3	Unit
9		desa godean - desa ngepeh. KEC. LOCERET, Kab. Nganjuk		LPJU	7	Unit
10		Dusun Tegal Abeh Desa Pule Kec. jatikalen , Kab. Nganjuk		LPJU	5	Unit
11		desa begendeng sampai dusun tambak kec. jatikalen, Kab. Nganjuk		LPJU	6	Unit
12		Dusun Keduk Ds. Kebonagung , Kab. Nganjuk		LPJU	7	Unit
13		Desa Nglinggo KEC. GONDANG, Kab. Nganjuk		LPJU	10	Unit
14		RT 002 RW 001 Desa Kerepkidul Kec. bagor , Kab. Nganjuk		Rubber Speed Bump	24	Meter
15		Desa Sekaran sampai Desa patihan kec. loceret, Kab. Nganjuk		LPJU	20	Unit
16		Kecamatan Wilangan, Kab. Nganjuk		LPJU	30	Unit
17		Jl. Kawi Kelurahan Kedondong Kec. Bagor , Kab. Nganjuk		LPJU	5	Unit
18		Jl. Arjuna Kelurahan Kedondong Kec. Bagor , Kab. Nganjuk		LPJU	5	Unit
19		Dusun Kurungrejo Klaten dan Dusun Lumpangrenteng Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon, Kab. Nganjuk		LPJU	60	Unit
20		Ds kendalrejo sampai Ds kerepkidul Kec.Bagor , Kab. Nganjuk		LPJU	10	Unit
21		Jalan Sawahan- Jegreg (Ruas Jegreg-Jati '787) Dusun Jati Desa Sawahan Kec. Lengkong , Kab. Nganjuk		LPJU	2	Unit

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2025, yaitu **"Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural"**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi, dengan prioritas pembangunan tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan investasi berbasis sector potensial pertanian, serta pengembangan perdagangan dan industri;
2. Mendorong berkembangnya sector strategis usaha mikro, koperasi, ekonomi kreatif dan pariwisata;
3. Pemantapan SDM berdaya saing melalui peninkatan akses dan kualitas Kesehatan dan Pendidikan berkarakter;
4. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran serta pemenuhan kebutuhan social dasar dan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata pendorong konektivitas antar wilayah dan aktivitas perekonomian;
6. Tatakelola pemerintah yang bersih dan inovasi serta digitalisasi pelayanan publik;
7. Nilai-nilai toleransi, keharmonisan, ketentraman dan keamanan untuk menuju masyarakat yang berbudaya.

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, dirumuskan Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025. Selain itu, Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025, juga untuk mendukung pelayanan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Tujuan Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah "Meningkatnya Keselamatan transportasi Melalui penyelenggaraan transportasi daerah yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan", adapun sasaran yang akan dicapai adalah "Meningkatkan keselamatan Transportasi", dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
Meningkatnya Keselamatan transportasi Melalui penyelenggaraan transportasi daerah yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	22
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2025**
Meningkatkan keselamatan Transportasi	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	22

3.2 Program dan Kegiatan

Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk maupun isu-isu penting dinas perhubungan melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi. Guna meningkatkan pelayanan pada masyarakan maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sangat diperlukan, adapun fokus perubahan sektor Perhubungan beserta sarana pendukungnya yang terdiri dari :

1) Bimbingan teknis keselamatan angkutan orang dan barang
2) Pengujian kendaraan bermotor, dimana pada tahun 2022 layanan uji Kir telah dilengkapi dengan aplikasi sehingga wajib uji dapat mendaftar via online dan melakukan pembayaran secara non tunai
3) Pembangunan palang pintu kereta api sebagai tindak lanjut amanat permenhub No. PM 94 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan
4) Penyediaan perlengkapan jalan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sehingga dapat berfungsi sesuai standart perlengkapan jalan
5) Kegiatan rekayasa lalulintas diharapkan dapat mengantisipasi kemacetan yang ditimbulkan dari peningkatan volume kendaraan pribadi.
6) Pembangunan halte pada lokasi-lokasi pemberhentian angkutan umum.
7) Pemeliharaan terminal dan halte sehingga berfungsi sebagaimana mestinya.
8) Mengoptimalkan pelayanan angkutan sekolah gratis dan angkutan sekolah sahabat disabilitas

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk sebagaimana tabel berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KAB. NGANJUK
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN							**57.782.779.350,00**	**37.955.742.836,00**	**40.525.844.450,00**	**-27.256.934.900,00**							**47.706.414.521,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**57.782.779.350,00**	**37.955.742.836,00**	**40.525.844.450,00**	**-27.256.934.900,00**							**47.706.414.521,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**57.782.779.350,00**	**37.955.742.836,00**	**40.525.844.450,00**	**-27.256.934.900,00**							**47.706.414.521,00**	
1	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas Perhubungan**				**91,5 Nilai**	**91,5 Nilai**	**29.966.852.850,00**	**24.474.239.186,00**	**20.918.560.400,00**	**-1.807.949.045,00**							**28.158.903.805,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*				5 dokumen	8 dokumen	48.800.000,00	48.800.000,00	33.759.000,00	-15.541.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian	Masyarakat Kab Nganjuk		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	18.800.000,00	18.800.000,00	11.886.000,00	-6.914.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan;PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	10.780.000,00	-4.220.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	10.593.000,00	-4.407.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	7.461.096.000,00	7.485.672.236,00	7.853.165.000,00	452.069.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian	Pegawai Dinas Perhubungan		7.896.703.805,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	58 Orang/bulan	7.386.096.000,00	7.470.672.236,00	7.842.385.000,00	456.289.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			7.881.703.805,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	10.780.000,00	-4.220.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemerataan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	228.192.500,00	166.402.500,00	4.800.000,00	-223.392.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemerataan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian	Pegawai Dinas Perhubungan		34.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	87.512.500,00	87.512.500,00	0,00	-87.512.500,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemerataan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			26.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				80 Orang	64 Orang	140.680.000,00	78.890.000,00	4.800.000,00	-135.880.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemerataan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			8.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	1.290.087.600,00	1.294.878.800,00	1.063.547.750,00	-226.539.850,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemerataan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian	Pegawai Dinas Perhubungan		1.214.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39.999.100,00	42.604.600,00	42.604.600,00	2.605.500,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemerataan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	371.616.700,00	371.616.700,00	289.968.050,00	-81.648.650,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemerataan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			338.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	568.041.000,00	568.041.000,00	580.085.000,00	-7.956.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			561.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-2.600.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	12.998.800,00	12.984.500,00	12.984.500,00	-14.300,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			13.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	20.992.000,00	20.992.000,00	16.793.680,00	-4.198.400,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	271.440.000,00	276.240.000,00	138.712.000,00	-132.728.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			237.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang disediakan*				143 Unit	143 Unit	3.875.590.350,00	433.691.250,00	475.252.250,00	-2.600.338.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian	Pegawai Dinas Perhubungan		1.312.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	6 Unit	2.544.365.900,00	0,00	0,00	-2.544.365.900,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				89 Unit	89 Unit	168.761.150,00	168.761.150,00	168.761.150,00	0,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			182.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				47 Unit	38 Unit	362.463.300,00	264.930.100,00	308.491.100,00	-55.972.200,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			130.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	16.772.170.000,00	13.901.120.000,00	10.302.362.000,00	-6.469.808.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian	Pegawai Dinas Perhubungan		16.533.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				13 Laporan	12 Laporan	15.921.600.000,00	13.050.550.000,00	9.466.092.000,00	-6.455.508.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			16.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	847.520.000,00	847.520.000,00	833.220.000,00	-14.300.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			430.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang terpelihara*				279 Unit	279 Unit	1.150.916.400,00	1.143.674.400,00	1.186.174.400,00	35.258.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian	Pegawai Dinas Perhubungan		1.133.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				47 Unit	47 Unit	844.315.800,00	837.073.800,00	879.573.800,00	35.258.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			631.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				70 Unit	70 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				160 Unit	160 Unit	70.600.600,00	70.600.600,00	70.600.600,00	0,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			66.500.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	216.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			215.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Jumlah Kendaraan Angkutan Yang Lulus Uji Kir Persentase pemasangan perlengkapan jalan Load Factor Angkutan Sekolah Gratis V/C Rasio jalan perkotaan**				**89,10 99 100 0,3 % % % nilai**	**99 89,10 100 0,3 % % % nilai**	**37.815.926.500,00**	**13.461.503.650,00**	**19.507.284.050,00**	**-18.258.415.784,00**							**19.547.516.716,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Jalan dan Perlengkapan Jalan Yang Tersedia dan Dipelihara*				1877 Unit	1877 Unit	28.303.163.600,00	2.884.808.156,00	9.029.404.756,00	-17.273.758.856,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian	Masyarakat Kab.Nganjuk		6.406.024.426,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				3 Unit	2 Unit	110.570.000,00	110.570.000,00	110.570.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			125.088.758,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1256 Unit	56 Unit	23.964.866.900,00	572.344.000,00	1.719.440.600,00	-22.185.425.400,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			4.042.433.432,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				4 Unit	4 Unit	41.334.000,00	41.334.000,00	41.334.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			46.746.979,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				11723 Unit	11723 Unit	2.246.393.600,00	2.160.560.150,00	7.158.060.150,00	4.911.666.550,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			2.191.753.247,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Jumlah Terminal Tipe C Yang di Bangun dan Dikelola*				1 Unit	1 Unit	2.855.119.000,00	1.114.233.100,00	1.102.732.100,00	-952.386.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian	Masyarakat Kab.Nganjuk		1.830.084.652,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	1 Unit	2.855.119.000,00	1.114.233.100,00	1.102.732.100,00	-952.386.900,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			1.830.084.652,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan*				4 Laporan	4 Laporan	3.404.544.000,00	3.504.544.000,00	3.889.269.000,00	484.725.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian	masyarakat kabupaten nganjuk		3.920.138.880,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	3.404.544.000,00	3.504.544.000,00	3.889.269.000,00	484.725.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			3.920.138.880,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Kendaraan bermotor yang wajib diuji secara berkala*				6124 Unit	6124 Unit	506.597.500,00	456.597.500,00	456.597.500,00	-50.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian	MASYARAKAT		1.382.422.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			910.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				5000 Dokumen	5000 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			125.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				13 Unit	13 Unit	331.597.500,00	331.597.500,00	331.597.500,00	0,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ringinanom	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			347.422.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan*				4 Laporan	4 Laporan	3.417.843.900,00	3.399.458.900,00	3.232.098.700,00	-185.745.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian	masyarakat kabupaten nganjuk		2.808.453.558,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	349.475.000,00	311.600.000,00	312.700.000,00	-36.775.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			259.123.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	39.680.000,00	59.170.000,00	25.586.000,00	-14.094.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			11.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	188.156.000,00	188.156.000,00	172.306.000,00	-15.850.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			137.768.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.738.732.900,00	2.738.732.900,00	2.621.506.700,00	-117.226.200,00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			2.199.576.358,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.8017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	101.800.000,00	101.800.000,00	100.000.000,00	-1.800.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			200.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Permohonan Andalalin yang Ditindaklanjuti*				4 Laporan	4 Laporan	14.000.000,00	32.350.000,00	6.000.000,00	-8.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian	masyarakat kabupaten nganjuk		25.872.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				4 Laporan	0 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			12.992.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.8006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																		
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				4 Laporan	4 Laporan	11.500.000,00	32.350.000,00	6.000.000,00	-5.500.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			12.580.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Yang Dilaksanakan*				4 Laporan	4 Laporan	675.810.000,00	675.810.000,00	497.350.000,00	-178.460.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian	Pengemudi dan Pengusaha atau Penyedia Jasa Angkutan Umum di wilayah Kabupaten Nganjuk		815.317.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.8007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																		
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				4 Laporan	4 Laporan	675.810.000,00	675.810.000,00	497.350.000,00	-178.460.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			815.317.400,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia*				24 Unit	24 Unit	1.438.848.500,00	1.413.702.000,00	1.393.832.000,00	-45.016.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian	kelompok masyarakat, pelajar atau siswa sekolah untuk pelayanan angkutan umum di wilayah Kabupaten Nganjuk		2.359.197.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.8002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.8003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				24 Unit	24 Unit	1.388.848.500,00	1.413.702.000,00	1.393.832.000,00	4.983.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; PS Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			2.209.197.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	JUMLAH								**67.782.779.350,00**	**37.955.742.836,00**	**40.525.844.450,00**	**-27.256.934.900,00**							**47.706.414.521,00**	

Tabel 3.2

Analis Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum			Sesudah			Alasan Perubahan Renja PD
		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu	
	Dinas Perhubungan			37,955,742,836			40.525.844.450	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			37,955,742,836			40.525.844.450	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			37,955,742,836			40.525.844.450	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	91,5 Nilai	24,474,239,186	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	91,5 Nilai	20,918,560,400	
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 dokumen	48,800,000	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 dokumen	33,259,000	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	18,800,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11,886,000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15,000,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10,780,000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	15,000,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	10,593,000	
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7,485,672,236	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7,853,165,000	

9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	7,470,672,236	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	7,842,385,000	Penambahan 4 orang CPNS baru
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	15,000,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	10,780,000	
11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	166,402,500	Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,800,000	
12	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	87,512,500	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	78,890,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	64 Orang	4,800,000	
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Dokumen	1,294,878,800	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Dokumen	1,063,547,750	
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	42,604,600	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	42,604,600	
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	371,616,700	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	289,968,050	
17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	568,041,000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	560,085,000	
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	2,400,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2,400,000	

19	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	12,984,500	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	12,984,500	
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	20,992,000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	16,793,600	
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	276,240,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	138,712,000	
22	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang disediakan	143 Unit	433,691,250	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang disediakan	143 Unit	475,252,250	
23	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	-	
24	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	89 Unit	168,761,150	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	89 Unit	168,761,150	
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	264,930,100	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38 Unit	306,491,100	Penambahan peralatan zoom meeting
26	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	13,901,120,000	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	10,302,362,000	
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3,050,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3,050,000	
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13,050,550,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9,466,092,000	Pergeseran ke sub kegiatan rehabilitasi & pemeliharaan perlengkapan jalan
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	847,520,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	833,220,000	
30	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang terpelihara	279 Unit	1,143,674,400	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang terpelihara	279 Unit	1,186,174,400	

31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	837,073,800	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	879,573,800	Penambahan pemeliharaan 1 kendaraan dinas operasional baru
32	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	70 Unit	20,000,000	Jumlah Mebel yang Dipelihara	70 Unit	20,000,000	
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 Unit	70,600,600	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 Unit	70,600,600	
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	216,000,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	216,000,000	
35	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	V/C Rasio jalan perkotaan Load Factor Angkutan Sekolah Gratis Persentase pemasangan perlengkapan jalan Persentase Jumlah Kendaraan Angkutan Yang Lulus Uji Kir	0,3 % 100& 89,10% 99%	13,481,503,650	V/C Rasio jalan perkotaan Load Factor Angkutan Sekolah Gratis Persentase pemasangan perlengkapan jalan Persentase Jumlah Kendaraan Angkutan Yang Lulus Uji Kir	0,3 % 100& 89,10% 99%	19.607.284.050	
36	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan dan Perlengkapan Jalan Yang Tersedia dan Dipelihara	1877 Unit	2,884,808,150	Jumlah Prasarana Jalan dan Perlengkapan Jalan Yang Tersedia dan Dipelihara	1877 Unit	9.029.404.750	
37	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit	110,570,000	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit	110,570,000	
38	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Unit	572,344,000	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	56 Unit	1.719.440.600	Penambahan dari Aspirasi Masyarakat
39	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4 Unit	41,334,000	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4 Unit	41,334,000	
40	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	11723 Unit	2,160,560,150	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	11723 Unit	7,158,060,150	Pergeseran dari sub kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik penbayaran Listrik PJU

41	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C Yang di Bangun dan Dikelola	1 Unit	1,114,233,100	Jumlah Terminal Tipe C Yang di Bangun dan Dikelola	1 Unit	1,102,732,100	
42	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	1,114,233,100	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	1,102,732,100	
43	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan	4 Laporan	3,504,544,000	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan	4 Laporan	3,889,269,000	
44	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	3,504,544,000	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	3,889,269,000	Penyesuaian kerjasama retribusi parkir/pihak ketiga
45	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan bermotor yang wajib diuji secara berkala	6124 Unit	456,597,500	Jumlah Kendaraan bermotor yang wajib diuji secara berkala	6124 Unit	456,597,500	
46	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	-	
47	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5000 Dokumen	125,000,000	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5000 Dokumen	125,000,000	
48	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	13 Unit	331,597,500	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	13 Unit	331,597,500	

49	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 Laporan	3,399,458,900	Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 Laporan	3,232,098,700	
50	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	311,600,000	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	312,700,000	Penambahan untuk pengamanan NATARU
51	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	59,170,000	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	25,586,000	
52	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	188,156,000	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	172,306,000	
53	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 Dokumen	2,738,732,900	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 Dokumen	2,621,506,700	
54	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	101,800,000	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	100,000,000	
55	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Permohonan Andalalin yang Ditindaklanjuti	4 Laporan	32,350,000	Jumlah Permohonan Andalalin yang Ditindaklanjuti	4 Laporan	6,000,000	
56	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4 Laporan	-	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4 Laporan	-	

57	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	4 Laporan	32,350,000	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	4 Laporan	6,000,000	
58	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Yang Dilaksanakan	4 Laporan	675,810,000	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Yang Dilaksanakan	4 Laporan	497,350,000	
59	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 Laporan	675,810,000	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 Laporan	497,350,000	
60	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	24 Unit	1,413,702,000	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	24 Unit	1,393,832,000	
61	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	-	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	-	
62	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	24 Unit	1,413,702,000	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	24 Unit	1,393,832,000	
	JUMLAH			**37,955,742,836**			40.525.844.450	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026, sehingga target kinerja tahun 2025 dapat dicapai dengan optimal.

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Perhubungan dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan RPD dan Renstra Dinas Perhubungan yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Perhubungan, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan; dan
   c. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Perhubungan.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan
3. Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Perhubungan dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001